

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Pada kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori menurut para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam pelaksanaan penelitian penulis. Disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

##### **2.1.1 Sistem Informasi Keuangan Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi Keuangan Desa**

Sistem Informasi Keuangan Desa pada dasarnya adalah Sistem Informasi Akuntansi, Sebelum mendefinisikan pengertian Sistem Informasi Keuangan Desa secara menyeluruh, maka penulis akan mengurai terlebih dahulu definisi Sistem Informasi Akuntansi menurut beberapa ahli.

Menurut Lilis Puspitawati (2021:49) sistem informasi akuntansi adalah:

“suatu sistem yang berfungsi untuk mengotorisasi dokumen, laporan dan data transaksi untuk menghasilkan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan suatu informasi keuangan yang berkualitas dan berguna untuk pembuatan keputusan manajemen dan dapat memudahkan dalam mengelola kegiatan perusahaan.”

Menurut Romney & Steinbart (2018:10) sistem informasi akuntansi adalah:

“sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan.”

Sedangkan Menurut Turner, Weickgenannt, & Copeland (2017:4):

“sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

Dari definisi sistem informasi akuntansi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang dibuat untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengelola data untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat berguna untuk pembuatan keputusan manajemen.

Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yaitu hak dan kewajiban atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Berdasarkan definisi di atas, maka Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola

keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes sehingga bisa memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Realisasi Anggaran desa merupakan semua bentuk penganggaran dalam pemerintahan desa guna pembangunan desa.

### **2.1.1.2 Indikator Sistem Informasi Akuntansi**

Terdapat enam komponen Sistem Informasi Akuntansi menurut Marshall

B. Romney and Paul J. Steinbart (2015:36) sebagai berikut:

1. Para pengguna yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatannya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat perifer, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

Berdasarkan pernyataan Romney dan Steinbart (2015:36) Sistem Informasi Akuntansi memiliki enam komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Enam komponen tersebut memungkinkan Sistem Informasi Keuangan untuk memenuhi tiga fungsi penting sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi.
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel.
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.

Berdasarkan komponen Sistem Informasi Akuntansi menurut Marshall B. Romney and Paul J. Steinbart (2015:36), maka didalam penelitian ini menggunakan komponen Sistem Informasi Akuntansi tersebut sebagai indikator Sistem Informasi Akuntansi.

## **2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sebelum mendefinisikan pengertian kompetensi sumber daya manusia maka penulis perlu mengurai terlebih dahulu pengertian perkata, yaitu menurut beberapa ahli diantaranya:

Menurut Sudarmanto (2015:54), kompetensi adalah:

“kompetensi merupakan pengetahuan (*knowledge competencies*) dan keahlian (*skill competencies*) cenderung lebih nyata (*visible*) dan relative berbeda di permukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia”.

Menurut Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah (2017:142) kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap.

Dari definisi kompetensi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Menurut Hasibuan Malayu (2017:10) sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif & efisien

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Mathis dan Jackson (2016:21) sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan organisasi. sumber daya manusia adalah

Dari definisi sumber daya manusia diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa SDM adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya.

Kemudian definisi kompetensi sumber daya manusia Menurut Donni Juni Priansa (2018:252), adalah:

“Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berfokus pada kinerja dan produktivitas kerja yang handal melalui pembangunan pegawai berbasis kompetensi.”

Menurut Mangkunegara (2017:40) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya manusia.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang di kemukakan oleh para ahli, maka kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. kompetensi sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai atau aparatur desa sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Seorang pegawai yang tidak

memiliki kompetensi akan melakukan pekerjaan lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan.

### **2.1.2.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Sudarmanto (2015:53) terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. Motif (*motive*)
2. Sifat (*traits*)
3. Konsep diri (*self-concept*)
4. Pengetahuan (*knowledge*)
5. Keterampilan (*skill*)

Adapun penjelasan mengenai karakteristik kompetensi yang dikemukakan oleh Sudarmanto (2015:53) adalah sebagai berikut:

1. Motif (*motive*), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motif akan mendorong, mengarahkan perilaku, terhadap tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat (*traits*), adalah karakter fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri (*self-concept*), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai yang dijunjung tinggi seseorang serta suatu sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan yang diwujudkan dalam pekerjaan atau kehidupannya.
4. Pengetahuan (*knowledge*), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Sumber-sumber pengetahuan diperoleh dari hasil telaah (*study, learning*) dan pengalaman (*experience*) serta intuisi (*intuition*). Pengetahuan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan

tugas tertentu melalui belajar. Belajar adalah mengaitkan secara bersama-sama antara data dengan informasi, pengalaman, dan sikap yang dimiliki seseorang.

5. Keterampilan (*skill*), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi, pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh mengorganisasi data dan rencana) dan pemikiran konseptual.

Berdasarkan karakteristik kompetensi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Sudarmanto (2015:53), maka didalam penelitian ini menggunakan karakteristik kompetensi sumber daya manusia tersebut sebagai indikator kompetensi sumber daya manusia.

### **2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

#### **2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Moh. Khusaini (2018:71) menjelaskan pengertian akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan.”

Menurut Miriam Budiardjo (2016:78) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.

Menurut Mohamad Mahsun (2014:83), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan dan meminta keterangan mengenai kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan tertentu.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa, pengelolaan dana desa adalah segala sesuatu yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) pengelolaan dana desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Dana Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

### 2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas

Menurut David Halmer dan Mark Turner (2006:115) akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, diantaranya:

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
2. Kepekaan (*Sensitivity*)
3. Keterbukaan (*transparency*)
4. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Adapun penjelasan mengenai instrumen dalam pengukuran akuntabilitas yang dikemukakan oleh David Halmer dan Mark Turner (2006:115) adalah sebagai berikut:

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.

Secara umum, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

2. Kepekaan (*Sensitivity*)

*Kepekaan* yang dimaksud disini yakni sebuah responsivitas aparatur pemerintah kepada aspirasi masyarakat

3. Keterbukaan (*transparency*)

Nantinya akan memperlihatkan sistem kinerja yang sebelumnya dikerjakan dan menjadi evaluasi dalam pengambilan keputusan.

4. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait instrumen untuk mengukur akuntabilitas, maka didalam penelitian ini menggunakan instrumen tersebut sebagai indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Indra Bastian (2013:2) Diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Kemudian Harjito (2014:87) bahwa dimensi untuk mengetahui kesuksesan implementasi sebuah sistem antara lain dimensi pengguna sistem dan pengaruh organisasional. Pemerintah desa selaku organisasi pengguna dan aparatur desa sebagai pengguna sistem harus mendapatkan manfaat dari sistem keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas.

Hasil penelitian Widia Yulianti, Kamaliah dan Rasuli (2018) dengan jurnal yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Teknik sensus digunakan dalam Teknik pengambilan sampel. Setiap desa diambil 4 responden yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dengan

begitu jumlah responden keseluruhan adalah 64 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Menunjukkan hasil Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, semakin tidak baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Kam, C., Bertelli, A. M., & Held, A. (2020) dalam *American Political Science Review* yang berjudul *The electoral system, the party system and accountability in parliamentary government* menunjukkan bahwa sistem mempengaruhi akuntabilitas dengan cara yang berbeda. Secara khusus, sistem malah dapat melemahkan akuntabilitas.

Sedangkan penelitian Goo, E. E. K (2019) yang dilakukan terhadap desa-desa penerima dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. dengan menggunakan metode survei, menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

### **2.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Indra Kesuma (2014:76) Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan perusahaan.

Menurut Edy Sutrisno (2010:8) Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Hasil penelitian Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2021) dalam *Journal of Asian Finance* yang berjudul “*Financial management information system, human resource competency and financial statement accountability: a case study in Indonesia*” dengan hasil penelitian, sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana di pemerintahan desa di kabupaten Tabanan.

Penelitian yang dilakukan Riadul Jannah (2018) dalam *International Journal of Scientific Research and Management* yang berjudul “*The influence of human resources, use of information technology and public participation to the transparency and accountability of village financial management*” mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan partisipasi publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Praya Timur.

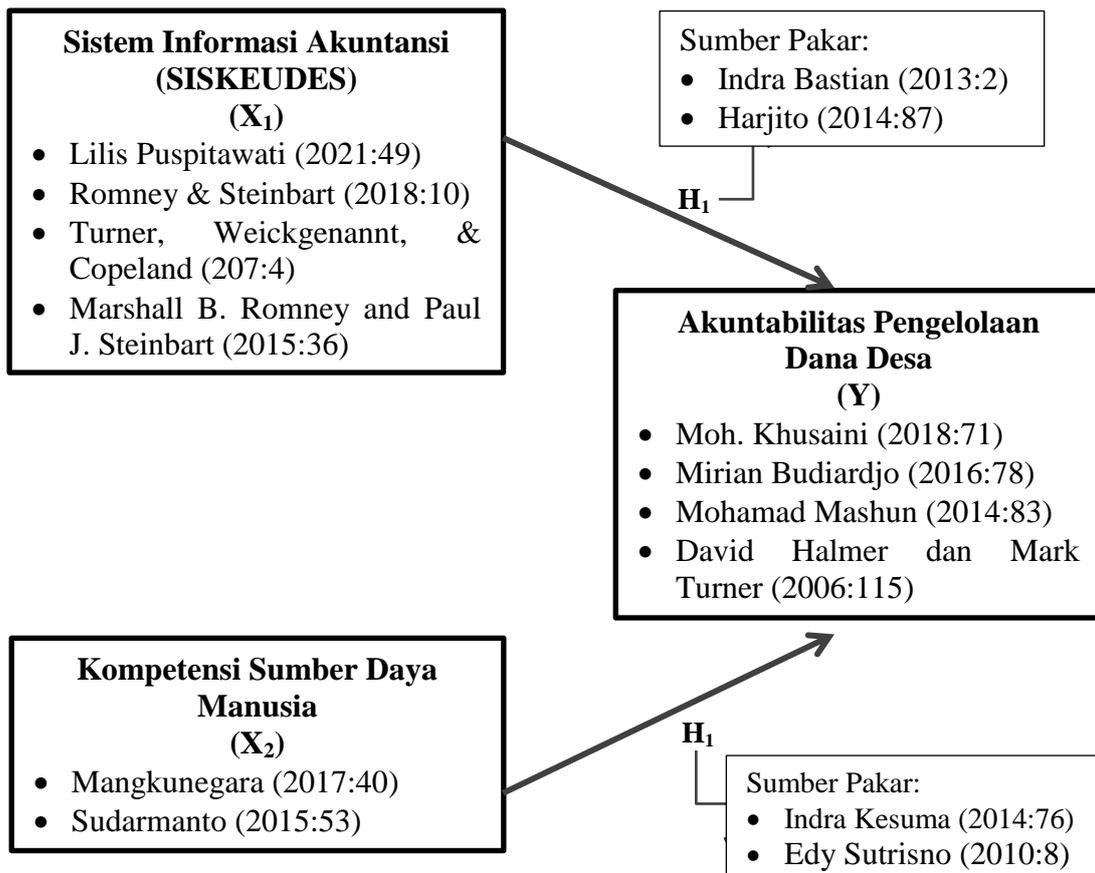
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) dengan jurnalnya yang berjudul “Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa: studi kasus Desa di Kecamatan Pancur Kab. Rembang”

menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diprediksikan penelitian ini akan memberikan hasil bahwa sistem Informasi Keuangan Desa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

### 2.2.3 Paradigma Penelitian

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai paradigma penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Pemikiran yang telah diuraikan diatas, hipotesis untuk penelitian ini yaitu:

- H<sub>1</sub> : Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa.
- H<sub>2</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa.